

IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI
DESA PADANG KUNIK KECAMATAN PANGEAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi
Administrasi Negara



Oleh :
SITI AMINAH
NPM: 210411055

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Padang
Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi
NAMA : Siti Aminah
NPM : 210411055
UNIVERSITAS : Universitas Islam Kuantan Singingi
FALKUTAS : Ilmu Sosial
JURUSAN : Ilmu Administrasi
PROGRAM STUDI : Ilmu Administrasi Negara

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

PEMBIMBING II



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

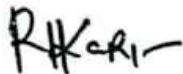
PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 17
Bulan : April
Tahun : 2025

Tim Penguji

KETUA

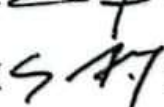


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SEKRETARIS



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059902

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|---|
| 1. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si | (Pembimbing I) | () |
| 2. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si | (Pembimbing II) | () |
| 3. SARJAN M, S.Sos., M.Si | (Anggota Penguji I) | () |
| 4. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si | (Anggota Penguji II) | () |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Siti Aminah
NPM : 210411055
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Kuantan Singingi
Alamat : Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten
Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan yang saya buat atau karya ilmiah yang saya hasilkan dengan judul **Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi** merupakan hasil karya saya sendiri tidak melakukan kegiatan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain.

Apabila terdapat dengan secara sengaja melakukan kegiatan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain, maka saya dengan senang hati bersedia dituntut sesuai dengan prosedur dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan keaslian hasil karya ilmiah atau skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya dan dibuat dengan keadaan sadar serta tidak ada paksaan dari pihak manapun dan siapapun.

Padang Kunik. / Januari 2025


CFEF1AMX078467890
Siti Aminah

MOTTO

“Hidup adalah dengan pilihan, apa yang kamu capai hari ini adalah pilihanmu di masa lalu, oleh sebab itu selalu berfikir dahulu sebelum bertindak”

“Tidak ada kata terlambat untuk belajar, teruslah berbuat maanfaat untuk sesama supaya hidup kita lebih berarti”

IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN
DI DESA PADANG KUNIK KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

Oleh:

Siti Aminah

Program Studi Administrasi Negara, Universitas Islam Kuantan Singingi

E-mail: sa9106133@gmail.com

Abstrak

Implementasi program ketahanan pangan yang baik dari masyarakat merupakan tujuan utama pemerintah dalam melakukan pemberdayaan dan peningkatan sumber ketahanan pangan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui kebijakan ketahanan pangan pemerintah mengharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sehingga memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tingkat implementasi dan faktor-faktor penghambat dalam Program ketahanan pangan di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif dengan proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Penelitian dilakukan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Faktor yang menghambat implementasi kebijakan ketahanan pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean yaitu kurangnya fasilitas, Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean, kemudian juga kurangnya anggaran yang diberikan pemerintah untuk mendukung terlaksananya kebijakan ketahanan pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean seperti pelaksanaan kegiatan baik penyuluhan, pertemuan dalam penyusunan program maupun pembuatan percontohan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Padang Kunik telah terlaksana dengan cukup baik oleh pemerintahan desa.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Ketahanan Pangan

IMPLEMENTATION OF THE FOOD SECURITY PROGRAM IN PADANG
KUNIK VILLAGE, PANGEAN DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY

By:

Siti Aminah

State Administration Study Program, Kuantan Singingi Islamic University

E-mail: sa9106133@gmail.com

Abstract

The implementation of a good food security program from the community is the main goal of the government in empowering and improving regional food security resources in Kuantan Singingi Regency. Through the food security policy, the government hopes to increase economic growth and development so as to provide welfare to the community. The purpose of this study is to find out and analyze the level of implementation and inhibiting factors in the food security program in Kuantan Singingi Regency. This study uses a qualitative research method with a descriptive case study approach with a data collection process through interviews, observations and document studies. The research was conducted in Padang Kunik Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. The factors that hinder the implementation of food security policies in Padang Kunik Village, Pangean District are the lack of facilities, facilities and infrastructure in the implementation of the food security program in Padang Kunik Village, Pangean District, then also the lack of budget provided by the government to support the implementation of food security policies in Padang Kunik Village, Pangean District such as the implementation of activities both counseling, meetings in program preparation and pilot activities. The community has the ability to realize food security and nutrition through the development of a subsystem of availability, distribution, and food consumption by utilizing local resources in a sustainable manner.

Keywords: Implementation, Policy, Food Security

KATA PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunianya menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan. Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai dan untuk jutaan impian yang akan dikejar. "Usaha tidak akan mengkhianati hasil" itulah pepatah yang selalu saya pegang dalam menjalani kehidupan dikala semangat *up and down*.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk Ayahanda Sumar dan Ibundaku Hasida, ribuan kilo jalan yang mereka tempuh setiap tetes keringat yang jatuh kebumi tidak bisa membayar semua pengorbanannya hanya ucapan terimakasih tiada henti bersyukur telah dilahirkan dari keluarga yang sederhana namun begitu hangat, keluarga besar tercinta yang telah memberi semangat sampai saat. Beserta keluarga yang tercinta selalu mendukung saya dalam menyelesaikan pendidikan

Ibu dan Bapak dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas untuk menuntun, mengarahkan dan memberikan bimbingan sehingga kami menjadi manusia yang berilmu. Semoga benang yang kita jalin tidak putus disini saja, kami mohon tunjuk ajar kami dalam setiap langkah yang kami ambil di dalam kehidupan sehingga dapat mengamalkan ilmu padi "Semakin berisi semakin merunduk".

Untuk sahabat yang sama-sama berjuang (Vinny Alvioningsi, Sherly Syafriani, Alji Mailadi Irawan, Donal Parinra, Damra Abdul Hakim,) terima kasih kalian selalu ada, semangat dari kalian membuat saya semangat sampai saat ini. Terima kasih juga kepada orang-orang terdekat yang selalu mendukung hingga

sampai titik ini.

Dan terimakasih juga kepada pegawai kantor Padang Kunik yang melayani dengan ramah dalam setiap data yang saya butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini, tak lupa keluarga besar Administrasi Negara Angkatan 2021. Rekan-rekan seperjuangan ini bukan akhir namun ini awal, ketika lelah istirahatlah namun jangan pernah berhenti.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA PADANG KUNIK KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**, yang merupakan salah satu persyaratan meraih gelar serjana Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda Rasulullah SAW. Penulis menyadari bahwa sejak awal selesainya penulisan Proposal ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Olehkarena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak **Emilia Emharis, S.Sos., M.Si** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi. Yang juga selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktu bimbingan dan banyak memberikan masukan kepada penulis.
4. Bapak **Alsar Andri S.Sos., M.Si** selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktu bimbingan dan banyak memberikan masukan kepada penulis. Yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh keluarga besar penulis, Umul Khairi dan Siti Rohani yang sungguh luar biasa dukungannya, beserta keponakan dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Teman dekat saya Dodon Saputra, Ririn Elvionita, Ayu Lestari yang telah memberikan arahan dan motivasi, serta memberi semangat yang tiada henti dari awal pembuatan Skripsi ini sampai selesai.

7. Teman-teman seperjuangan, kelas A dan B terima kasih atas dukungan serta pengalaman yang hebat selama diperkuliahan. semoga skripsi ini bermanfaat serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi setiap kalangan. Aamiin.

Akhir kata, penulis memahami bahwasanya tak ada di dunia ini yang sempurna, tak terkecuali proposal ini. Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengharapkan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teluk Kuantan, 10 Januari 2025

Siti Aminah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.1.1 Konsep Administrasi Negara	9
2.1.2 Konsep Kebijakan Publik	13
2.1.3 Konsep Implementasi	21
2.1.4 Konsep Ketahanan Pangan	17
2.2 Kerangka Pemikiran.....	20
2.3 Definisi Operasional.....	21
2.4 Operasional Variabel.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Informan.....	24

3.3	Sumber Data.....	25
3.4	Fokus Penelitian.....	27
3.5	Lokasi Penelitian.....	27
3.6	Metode Pengumpulan Data.....	27
3.7	Teknik Analisi Data	27
3.8	Jadwal kegiatan Penelitian	28
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		29
4.1	Sejarah Kantor Desa Padang Kunik Pangean.....	29
4.2	Demografi Desa Padang Kunik Pangean	30
4.3	Visi Misi	37
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		39
5.1	Identitas Responden.....	39
5.1.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
5.1.2	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	40
5.1.3	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	41
5.2	Hasil Pembahasan Penelitian.....	41
5.2.1	Ketersediaan Pangan	42
5.2.2	Keterjangkauan Pangan.....	47
5.2.3	Pemanfaatan Pangan	52
BAB VI. PENUTUP		57
6.1	Kesimpulan.....	57
6.2	Saran	57
DFTAR PUSTAKA.....		59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Kerangka Pemikiran Berdasarkan Observasi Penelitian Tentang Program Ketahanan Pangan Desa Di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	20
Tabel II.2 Operasional Variabel Implementasi Program Ketahanan Pangan Desa Di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	23
Tabel III.1 Informan Penelitian tentang Program Ketahanan Pangan Desa Di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	25
Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Program Ketahanan Pangan Desa Di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	28
Tabel IV.1 Dusun Yang Ada Di Desa Di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	30
Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	31
Tabel IV.3 Jumlah Sarana Pendidikan.....	31
Tabel IV.4 Jumlah Sarana Ibadah Di Desa Padang Kunik.....	33
Tabel IV.2 Jumlah Fasilitas Umum.....	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Padang Kunik	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah membawa harapan baru kepada pemerintah dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara tidak langsung mendorong pemerintah desa untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Tujuan formal dari suatu Negara biasanya diidentikan dengan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang terus menerus dan berkesinambungan.

Fungsi utama dari suatu pemerintahan sejak dulu hingga sekarang yaitu menciptakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban bagi warga Negara dan pertahanan negara. Ketentraman dan ketertiban masyarakat yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai suatu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi, kekuatan masyarakat dalam mencegah segala bentuk gangguan yang meresahkan masyarakat.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menyebutkan “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”, dan “Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Salah satu bagian dari Pemerintahan Daerah adalah diberlakukannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 2 “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 3 dijelaskan, pengaturan desa berdasarkan :

- a. Rekognisi.
- b. Subsidiaritas.
- c. Keberagaman.
- d. Kebersamaan.
- e. Kegotongroyongan.
- f. Kekeluargaan.
- g. Musyawarah.
- h. Demokrasi.
- i. Kemandirian.
- j. Partisipasi.
- k. Kesetaraan.
- l. Pemberdayaan.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa hal ini termaktub didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 23. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyebutkan bahwa Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Di dalam Pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Ayat 1, Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
- i. mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- j. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- k. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- l. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- m. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- n. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- o. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- p. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tugas kepala desa yang disebutkan yaitu mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif untuk mencapai tujuan pembangunan di perlukan koordinasi dan kesungguhan dari aparat dalam melaksanakan tugastugas pembangunan dan menggerakkan masyarakat untuk turut serta berperan dalam merencanakan, melaksanakan, merealisasikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan sarana umum desa.

Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu desa yang ada di Indonesia desa ini memiliki beberapa potensi seperti dalam pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi tugas penting pemerintah termasuk pemerintahan desa. Berdasarkan Peraturan Nomor 17 tahun 2015 tentang Pangan Pasal 1 yang dimaksud dengan ketahanan pangan dan gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif. Dengan demikian suatu wilayah dikatakan berhasil dalam pembangunan ketahanan pangan jika adanya peningkatan produksi pangan, distribusi pangan yang lancar serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi pada seluruh masyarakat. Perwujudan ketahanan pangan nasional dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil yaitu pedesaan sebagai basis kegiatan pertanian. Basis pembangunan perdesaan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam suatu wilayah yang

mempunyai keterpaduan sarana dan prasarana dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk mencukupi dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah kerawanan pangan dan kemiskinan di pedesaan adalah melalui Program Mandiri Pangan. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari kehari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Sedangkan cadangan pangan pemerintah desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.

Kebijakan program ketahanan pangan merupakan nasional merupakan program pemerintah pusat yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 melalui Dana Desa yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Di desa padang kunik terdapat program ketahanan pangan yang dikelola secara swakelola oleh pemerintahan desa pada tahun 2024 yang di anggarkan dari dana desa tertuang dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (selanjutnya di singkat APBDES). Sebagai mana tertuang dalam tabel data APBDES padang kunik dibawah ini:

Tabel I.1: Data Anggaran Program Ketahanan Pangan Dari Dana Desa (DD) Padang Kunik Tahun 2024

No	Tahun	Anggaran Ketahanan Pangan (Rp)	Jenis Kegiatan	Luas Lahan	Keterangan
1	2022	126.644.400	Kebun jagung	1 ha	
2	2023	125.217.000	Kebun Jagung	1 ha	
3	2024	136.165.000	Kebun Jagung	1 ha	

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Kunik 2024

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pangan krisis pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang. Dalam hal ini masyarakat desa padang kunik belum secara maksimal menngelola program ketahanan pangan di karenakan kendala bencana alam berupa banjir dan hama tanaman. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian mengenai Implementasi kebijakan Ketahanan Pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi untuk optimalisasi pengelolaan ketahanan pangan masyarakat di Kecamatan Pangean. Oleh karena itu penulis membuat penelitian yang berjudul : “Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi program ketahanan pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian dapat diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan pemikiran melanjutkan dan meningkatkan program ketahanan pangan di Desa Padang Kunik, Kecamatan Pangean dan Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna menambah wawasan pemikiran bagi studi Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan implementasi program ketahanan pangan di desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau informasi bagi Pemerintah Desa dalam implementasi ketahanan pangan.

1.4.3 Manfaat Akademis

Secara akademis, sebagai sumbangan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori/Konsep Administrasi Negara

Dalam pembentukan organisasi misalnya, memilih bentuk organisasinya berbentuk formal maupun informal serta menyusun struktur nya baik secara vertical (hierarki) maupun horizontal. Semuanya adalah awal dari konkretisasi dari abstraksi administrasi, namun penampakan masih bersifat statis. Dinamisasi dari seluruh kegiatan kerja sama secara fungsional akan tampak pada pengelolaan atau tata laksana tugas dan fungsi organ-organ struktural dalam proses administrasi. Proses ini berlangsung secara hierarki sementara proses manajemen berlangsung secara fungsional, fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Administrasi dalam pengertian substansi sebagai pengaturan dapat dipergunakan sebagai lokus atau tataran kajian berbagai bidang kegiatan untuk peningkatan taraf hidup manusia. Bidang kegiatan manusia begitu banyak dari kompleks sehingga dapat dilakukan identifikasi sesuai kebutuhan kajian.

Beberapa bidang kegiatan yang di jadikan objek dalam lokus kajian administrasi antara lain :

1. Bidang Pendidikan, melahirkan administrasi pendidikan.
2. Bidang Pemerintahan, melahirkan ilmu administrasi pemerintahan.
3. Bidang Publik, melahirkan studi administrasi publik.
4. Bidang Kesehatan, melahirkan studi administrasi kesehatan.
5. Bidang Perbankan, melahirkan administrasi perbankan.

6. Bidang Pajak, melahirkan studi administrasi kekhususan pajak.

7. Bidang Bisnis, melahirkan lokus kajian administrasi pajak.

Sebagai fokus kajian, administrasi dijadikan objek pengkajian. Berbagai fenomena administrasi dikaji dari berbagai sisi aspek yaitu :

1. Hukum administrasi, mempelajari aspek hukum dalam administrasi.

Secara spesifik, hukum administrasi adalah hukum yang mengatur hubungan hukum kelembagaan yang disebut dengan hukum administrasi negara heteronom atau aturan hukum yang diperlakukan untuk luar dirinya sebagai administrator.

2. Pembangunan administrasi adalah studi tentang perubahan yang dilakukan adalah pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan kelembagaan.

3. Politik administrasi adalah studi tentang kekuasaan. Namun, jika politik diartikan sebagai kebijakan maka politik administrasi dapat diartikan sebagai kebijakan administrasi. Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa politik administrasi adalah aspek politik dalam administrasi sebagaimana kajian tentang netralitas birokrasi yang di kaji dari sisi kepentingan kekuasaan yang ada dalam lingkungan kerja dimana birokrasi melaksanakan fungsinya.

Menurut Hesti Umiyati, (2016: 2) Administrasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila secara formal dalam organisasi maka proses kerjasama tersebut adalah dalam upaya mewujudkan tujuan

organisasi. Karena begitu luasnya bidang administrasi, jadi tidak ada ilmu sosial yang lebih luas cakupannya dibandingkan dengan ilmu administrasi. Sebelum mengetahui pengertian administrasi menurut para ahli, ada baiknya kita memahami dulu pengertiannya secara umum. Dalam pengertian luas, administrasi merupakan proses kerja sama dari dua orang atau lebih dengan menggunakan berbagai fasilitas khusus untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengertian sempit, administrasi adalah bentuk aktivitas yang meliputi pencatatan, penyuratan, pembukuan sederhana, pengetikan, dan lainnya yang bersifat teknis ketatausahaan.

Menurut Dwight Waldo (dalam Mashur, 2016: 14) administrasi adalah suatu daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Menurut Yussa dan Hendry (2015: 10) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari batasan tentang administrasi ini terkandung beberapa makna yaitu :

1. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedangkan akhirnya tidak ada.
2. Administrasi mempunyai suatu unsur – unsur tertentu yaitu adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak di capai, adanya tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas – tugas itu (waktu, tempat, peralatan, materi dll).
3. Administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama – sama dengan timbulnya peradaban manusia.

Sebegitu luas cakupan ilmu administrasi Negara sehingga dapat pula mencakup ilmu-ilmu sosial lain terutama yang memiliki objek materialnya negara, yaitu antara lain : Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Negara itu sendiri. Dengan demikian ruang lingkup administrasi negara adalah sebagai berikut :

Bidang hubungan, pariwisata gejala pemerintahan yang banyak ditulis oleh pakar pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan kecamatan, administrasi pemerintahan kelurahan, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan kotamadya, administrasi pemerintahan kota administratif, administrasi departemen, dan administrasi non departemen.

Bidang ketatalaksanaan yang banyak ditulis oleh pakar ilmu administrasi publik. meliputi: administrasi pembangunan, administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kemiliteran, administrasi kepolisian, administrasi perpajakan, administrasi pengadilan, administrasi kepenjaraaan, dan administrasi perusahaan.

Bidang peraturan perundang-undangan yang banyak ditulis para pakar ilmu hukum tata Negara, meliputi landasan konstitusional, dan landasan operasional. Bidang kenegaraan yang banyak ditulis oleh pakar ilmu negara, meliputi tugas dan kewajiban negara, hak dan kewenangan Negara, tipe dan bentuk negara. Unsur- unsur negara, tujuan negara dan tujuan nasional.

Bidang pemikiran hakiki yang banyak ditulis oleh pakar ilmu filsafat, meliputi etika administrasi publik, estetika administrasi publik, cinta, rasa, karsa

administrator, logika administrasi publik, disiplin ilmu, sumber daya manusia,, hukum administrasi negara dan hakikat administrasi negara.

Bidang kekuasaan yang banyak ditulis oleh pakar ilmu politik, meliputi: administrasi politik luar negeri, administrasi politik dalam negeri, administrasi partai politik, posisi masyarakat LSM,

2.1.2. Teori/Konsep Kebijakan Publik

Menurut Awan Y. Abdoellah (2016: 7) mengatakan istilah “public policy” diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi “kebijakan publik”. Sedangkan menurut Thomas R Dye (dalam Awan Y. Abdoellah, 2016: 17) public policy atau kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever governance choose to do or not to do) dengan kata lain, isi public policy itu tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk pula apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah; termasuk misalnya “mengatur konflik”. Tegasnya, public policy itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut Budi Winarno (dalam Joko Pramono, 2020: 9-10) Pengertian kebijakan dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok

maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan- pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Menurut Prof.Dr.A.Hoogerwerf (dalam Awan Y. Abdoellah, 2016: 19) menyatakan policy itu merupakan usaha mencapai tujuan tertentu dan dalam urutan waktu serta sarana tertentu. policy adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, oleh karena itu ia adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah , suatu masalah tertentu dengan cara tertentu, yaitu dengan Tindakan yang terarah. Menurutny untuk mengetahui isi kebijakan itu sebaiknya menentukan terlebih dahulu hubungan antara masalah dengan kebijakan dan sebaliknya.

Menurut Solichin Abdul Wahab (dalam Awan Y. Abdoellah, 2016: 20) menengahkan ciri-ciri tentang kebijakan pemerintah/public yakni yang dilandasi pendapat David Easton , bahwa ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan pemerintah/public bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, misalnya pada para ketua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para raja dsb.

Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Awan Y. Abdoellah, 2016: 25) membedakan pengertian pembuatan keputusan dengan pembuatan

kebijakan/kebijaksanaan, yakni sebagai berikut: pembuat kebijakan atau policy formulation (policy making) berbeda dengan pengambilan keputusan (decision making) karena yang terakhir ini adalah pengambilan pilihan sesuatu alternatif dari berbagai alternatif mengenai sesuatu hal. Sedangkan policy making meliputi banyak pengambilan Keputusan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka definisi konseptual dari kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak. Umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijaksanaan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijaksanaan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”. Evaluasi kebijakan merupakan “Kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan oleh publik ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan *right to know* bagi warga masyarakat.

2.1.3 Teori/Konsep Implementasi

Menurut Lester dan Steward (dalam Mukhtar Mas'ud 2022: 14) menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (*outcome*). Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari hasil proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai dan tujuan diraih.

Menurut Awan Y.Abdoellah (2016: 57) implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik.

Menurut Solichin Abdul Wahab (dalam Awan Y.Abdoellah, 2016: 57) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan menyangkut masalah konflik, keputusan dan menyangkut siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada perumusan kebijakan. Kebijakan

publik hanya akan hanya sekedar berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Menurut Solichin Abdul Wahab (dalam Awan Y. Abdoellah, 2016: 57) menyatakan implementasi kebijakan adalah tahap perumusan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan, sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

2.1.4 Teori/Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pengertian Ketahanan pangan tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Pangan disini bukan hanya beras tetapi mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan dan hewan termasuk ikan baik produk primer maupun turunannya termasuk air minuman dengan

demikian proses produksi pangan tidak hanya dihasilkan oleh kegiatan sector pertanian tetapi juga pada industri pengolahan pangan.

- b. Menyediakan pangan yang cukup diartikan sebagai penyediaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu untuk memenuhi asupan zat gizi.
- c. Tersedianya pangan dalam kondisi aman diartikan sebagai bebas dari kandungan bahan biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu dan merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta aman dari aspek kaidah agama.
- d. Disamping keamanan pangan pemenuhan pangan perlu diperhatikan aspek mutu yang mencakup kenampakan fisik, citarasa, kandungan, zat gizi maupun keanekaragaman dan kelengkapan zat gizi.
- b. Tersedianya pangan dengan kondisi yang merata diartikan pangan tersedia setiap saat di setiap daerah lokasi penduduk diseluruh daerah.
- c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh setiap rumah tangga secara fisik maupun ekonomi yaitu dalam jarak dan harga yang terjangkau setiap saat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan mengandung makna makro dan mikro. Makna makro terkait dengan penyediaan pangan di seluruh wilayah setiap saat, sedangkan makna mikro terkait dengan kemampuan rumah tangga dan individu dalam mengakses pangan dan gizi sesuai kebutuhan dan pilihannya untuk tumbuh, hidup sehat dan produktif. Ketahanan pangan melekat pada individu, masyarakat, wilayah hingga tingkat nasional.

Di Indonesia konsep ketahanan pangan dituangkan dalam Undang-undang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi pada pasal 4 yaitu:

Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) terdiri atas kebijakan strategis di bidang:

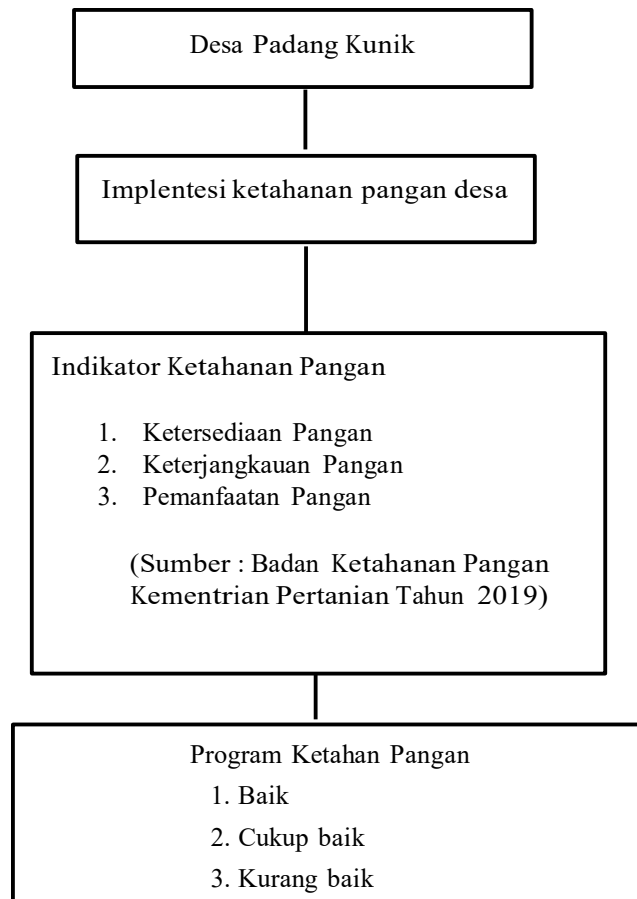
- a. ketersediaan pangan;
- b. keterjangkauan pangan;
- c. pemanfaatan pangan;
- d. perbaikan gizi masyarakat; dan
- e. penguatan kelembagaan pangan dan gizi

Berdasarkan Undang-Undang Pangan No 18 tahun 2012, penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan dan keadilan. Sejalan dengan hal tersebut kebijakan strategis ketahanan pangan strategis dijalankan atas dasar prinsip keadilan, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, kedaulatan dan stabilitas nasional, kemandirian, peran aktif para pihak, keamanan pangan, dan berkelanjutan untuk menghasilkan masyarakat yang sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Menurut Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian (2019: 45) Kebijakan strategis yang disusun mencakup aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan dengan memperhatikan keamanan pangan pada setiap aspek ketahanan pangan dan gizi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Tabel II. 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian tentang Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.



Sumber Data : Modifikasi Penelitian, Tahun 2024

2.3. Definisi Operasional

Ada beberapa indikator mengenai kebijakan kepala desa dalam implementasi program ketahanan pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan singingi yaitu :

2.3.1 Ketersediaan Pangan

Menurut Asep Dedy Strisno dkk (2022: 9) dalam ketersediaan pangan, masalah pokok adalah semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi dan daya saing pangan nasional. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor teknis dan sosial-ekonomi yaitu berkurangnya areal lahan pertanian karena derasnya alih lahan pertanian ke non pertanian seperti industri dan perumahan (laju 1% /tahun). Produktifitas pertanian yang relati frendah dan tidak meningkat. Sedangkan faktor sosial-ekonomi penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah. Sulitnya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam produksi pangan karena besarnya jumlah petani (21 juta rumah tangga petani) dengan lahan produksi yang semakin sempit dan terfragmentasi (laju 0,5% /tahun). Tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras. Tata niaga produk pangan yang belum pro petani termasuk kebijakan tarif imper yang melindungi kepentingan petani.

2.3.2. Keterjangkauan Pangan

Menurut Asep Dedy Strisno,dkk (2022: 7) akses pangan (food access), yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja dan

harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut ten tang preferensi pangan.

Akses pangan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Ini termasuk akses ekonomi, yang berarti Anda memiliki uang untuk membeli makanan, akses fisik, yang berarti Anda memiliki infrastruktur, dan akses sosial, yang berarti Anda memiliki dukungan sosial seperti barter, pinjaman, atau program jaring pengaman social. Akses pangan merujuk pada kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan makanan melalui produksi sendiri, pembelian, stok, atau bantuan disebut akses pangan.

2.3.3 Pemanfaatan Pangan

Menurut Asep Dedy Strisno, dkk (2022: 7) Penyerapan pangan (food utilization), yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air dan kesehatan lingkungan. Efektivitas dari penyerapan pangan tergantung pada pengetahuan rumah tangga/individu, sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas dan layanan kesehatan, serta penyuluhan gizi dan pemeliharaan balita.

2.4 Operasional Variabel

Tabel II. 2: Operasional Variabel Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Penilaian	Ukuran
Kebijakan Kepala Desa	Implementasi Program Ketahanan Pangan Desa	Ketersediaan Pangan	a. Terpenuhinya Kebutuhan	Ordinal
			b. Cadangan Pangan	
		Keterjangkauan Pangan	a. Kemampuan Akses Rumah Tangga	Ordinal
			b. Akses Ekonomi	
		Pemanfaatan Pangan	a. Konsumsi Makanan	Ordinal
			b. Nutrisi	

Sumber: Modifikasi Penelitian, 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey, dengan tingkat ekplanasi deskriptif dan analisa data kualitatif.

Menurut Saslow (dalam Irawan Suhartono, 2015: 53) survey adalah penelitian pengamatan yang berskala besar yang dilakukan pada kelompok-kelompok manusia.

Menurut Atherton & Klemmack (dalam Irawan Suhartono, 2015: 33) deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Menurut Moleong (2017: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2. Informan

Menurut Moleong (2016: 163) informan kunci atau informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling.

Menurut Sugiono (2016: 218) Purposive Sampling yaitu teknik mengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Didalam penelitian ini yang menjadi informannya ialah perangkat pemerintahan desa sebagai pembuat kebijakan.

Tabel III. 1 : Informan Penelitian tentang Implementasi Program Ketahanan Pangan Desa di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

NO	Unsur Informan	Jumlah Perangkat Desa		Persentase %
		Informan	Key Informan	
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Sekretaris Desa	1	1	100
3	Bendahara Desa	1	1	100
4	Kaur Umum	1	1	100
5	Kasi Pembangunan	1	1	100
6	Kasi Pemerintahan	1	1	100
7	Kepala Dusun	3	3	100
8	Operator Desa	1	1	100
9	Ketua BPD	1	1	100
Jumlah Keseluruhan		13	13	100

Sumber: Data Olahan Penulis 2024.

3.3 Sumber Data

Menurut Arikunto (2012: 107) sumber data pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugyono (2020: 104) data primer adalah merupakan sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugyono (2020: 104) data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti melainkan melalui berbagai dokumen yang dapat mendukung informasi.

3.4 Fokus Penelitian

Untuk fokus penelitian yang dilakukan ialah mengenai kebijakan yang telah dibuat kepala desa dalam implementasi program ketahanan pangan di desa padang kunik kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Pengambilan Data

3.6.1 Observasi

Menurut Sutrisno (dalam Sugiono 2014: 165) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, atau suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

3.6.2 Wawancara

Menurut Sugiono (2014: 157) wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiono (2013: 240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.6.4 Triangulasi

Menurut Sugiono (2017: 241) menyatakan triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dengan triangulasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2017: 245) teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis atau memeriksa data, mengorganisasikan data memilih dan memilahnya menjadi suatu yang diolah, dengan tiga komponen, yaitu :

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan perhatian kepada data-data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan juga sebagai pelengkap saja. Reduksi data bagian dari analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting.

3.7.2. Sajian Data

Menurut Sugiyono (2013: 49) “Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya”.

3.7.3. Penarikan kesimpulan

Menurut Sari (2020: 25) penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola – pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi. Dari sajian data yang telah disusun kemudian dapat dilakukan penarikan simpulan, yaitu kegiatan merumuskan kesimpulan yang dapat diverivikasikan selama penelitian berlangsung sehingga data dapat diuji validitasnya

3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III. 2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2025																							
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Pengajuan Judul proposal																								
	Pembuatan Proposal																								
	Bimbingan Proposal																								
	Ujian Proposal																								
	Revisi Proposal																								
	Bimbingan Skripsi																								
	Seminar Skripsi																								
	Revisi Skripsi																								

Sumber : Data Olahan Penulis 2024.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang peneliti dapat melalui hasil wawancara dan observasi dapat dikatakan bahwa Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Padang Unik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah terlaksana dengan cukup baik.

6.2 Saran

6.2.1 Agar pemerintah desa mempertahankan Program Ketahanan Pangan ini di Desa Padang Unik Kecamatan Pangean, karena program ini sudah berjalan dengan cukup baik.

6.2.2 Agar kepala Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean lebih sering terus mengupayakan penambahan dana untuk Program Ketahanan Pangan ini setiap tahunnya sesuai kebutuhan masyarakat desa.

6.2.3 Agar pemerintah desa membuat kotak saran di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean supaya masyarakat dapat memberikan masukan untuk program ketahanan pangan yang telah dilaksanakan.

6.2.3 Agar masyarakat Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi selalu aktif dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa dan musyawarah desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoellah Awan Y., 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta
- Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian, 2019. Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi 2020-2024
- Ernaya, Suradinata. 2013. Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah. Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Mas'ud Mukhtar. 2022. Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan, Makassar, Citra Multi Persada.
- Moleong, Lexi J., 2016. Metodologi penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung Remaja Rosdakarya.
- Munaf, Yusri, 2016. Hukum Administrasi Pertama. Cetakan Pertama. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Pramono Joko, 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Solo, UNISI Press
- Rasyid, Ryaas, 2013. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta, BPFE.
- Siagian, 2012. Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif R& D, Bandung, Alfabeta
- Sutrisno Dedy Asep, 2022. Ketahanan Pangan, Bandung-Indonesia, Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Umyati Hesti, Ode Amane Ade Putra, dkk, 2024. Pengantar Administrasi Negara, Bandung, Widia Media Utama.

Undang -Undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Undang-undang Nomor 83 Tahun 2017
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012